

**KETUA KAMAR PIDANA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

MEMORANDUM
Nomor 108/KM.PID/M.31/VIII/2025

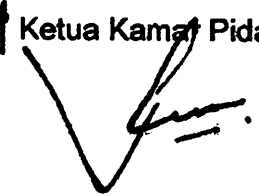
Yth. : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI
Dari : Ketua Kamar Pidana MA-RI
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA TPPU) Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 22 Agustus 2025

Sehubungan dengan surat dari Kepala PPATK Nomor T/276/DN.01.01/4.1/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal tersebut pada pokok memorandum, dengan ini diminta kepada Saudara agar dapat menunjuk perwakilan Hakim pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia yang telah ditunjuk sebagai responden dalam pengisian kuesioner tersebut, untuk:

1. Mengikuti Sosialisasi Pengisian Kuesioner secara online pada hari Rabu, 27 Agustus 2025, pk.13.30 WIB s/d selesai.
2. Mengisi Kuesioner Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA TPPU) Tahun 2025 paling lambat tanggal 12 September 2025.

Adapun tautan link zoom untuk kegiatan sosialisasi, tautan pedoman pengisian Kuesioner, dan tautan Pengumpulan Kuesioner, sebagaimana surat permohonan Kepala PPATK (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Kamar Pidana


Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN K E P A L A

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : T/277/DN.01.01/4.1/VIII/2025 Jakarta, 15 Agustus 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penilaian Risiko Nasional terhadap
Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA TPPU) Tahun 2025

Yth. Bapak/Ibu Pejabat Sebagaimana Terlampir
di
tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
2. Keputusan Kepala PPATK Nomor 101 Tahun 2025 tentang Tim Penyusunan Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai upaya dalam mewujudkan komitmen Indonesia atas kepatuhan standar Financial Action Task Force (FATF), khususnya dalam penerapan rekomendasi 1 mengenai penilaian risiko nasional terhadap TPPU terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terkini guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) kepada seluruh pihak pemangku kepentingan dalam melakukan mitigasi risiko terhadap TPPU maupun tindak pidana asal.

Berkenaan hal tersebut, PPATK selaku *focal point* dalam rezim anti pencucian uang bersama seluruh pihak pemangku kepentingan melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) akan melakukan pengkinan penilaian risiko nasional terhadap TPPU (*national risk assessment on money laundering*) tahun 2025. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini dalam tahapan pengumpulan data dan informasi secara nasional dari seluruh pihak pemangku kepentingan, dengan melibatkan pihak jasa konsultan terpilih yaitu **PT Surveyor Indonesia** sebagai



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



pelaksana survei nasional berbasis online atau *web based* melalui tautan berikut ini <https://nraindonesia.ppatk.go.id/kuesioner/3/tppu>.

Guna menyukseskan pelaksanaan penyusunan NRA TPPU Tahun 2025, kami harapkan adanya partisipasi aktif dan kerja sama dari seluruh pihak pemangku kepentingan, untuk dapat:

- melakukan pengisian survei secara online untuk mengidentifikasi faktor ancaman, kerentanan dan risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
- menyediakan basis data kuantitatif maupun kualitatif (*self-assessment*) terkait penanganan tindak pidana pencucian uang sesuai tugas, fungsi dan kewenangan instansi/lembaga;
- memberikan saran dan rekomendasi strategis & operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di tingkat domestik maupun lintas negara (*cross border crimes*);

Berkenaan hal tersebut, mohon perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk menunjuk perwakilan pejabat atau pegawai untuk dapat melakukan pengisian kuesioner sesuai batas waktu yang telah ditentukan **paling lambat disampaikan pada tanggal 12 September 2025** dengan buku pedoman pengisian yang telah disediakan berikut ini <https://bit.ly/PedomanNRA-2025>, password: NRAIndonesia2025. Bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh jawaban responden yang diberikan akan merepresentasikan kondisi instansi/lembaga masing-masing.

Sebagai tambahan informasi bahwa tim akan menyelenggarakan sosialisasi pengisian kuesioner tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025

Waktu : 13.30 WIB - selesai

Link Zoom : <https://bit.ly/SosialisasiNRA2025-Pengadilan> ✓

Meeting ID: 851 6828 0554 Passcode: 380693

Untuk konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut, kiranya dapat menghubungi narahubung Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPAK atas nama Sdr. Mardiansyah (HP: 0878-8589-6385) atau Sdri. Kristina Widhi (HP: 085-741-414-909) atau narahubung Hakim Yustisial Kamar Pidana Mahkamah Agung atas nama Bapak Dodik Setyo Wijayanto (HP: 0812-6069-5015) atau melalui email NRAIndonesia2025@ppatk.go.id.



Demikian permohonan ini kami sampaikan, keberhasilan penyusunan NRA TPPU Indonesia Tahun 2025 ini, sangat tergantung dari dukungan dan kerjasama yang baik dari instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Atas perhatian, dukungan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPATK



Ivan Yustiavandana



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BerAKHLAK
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



INDONESIA
OFFICIAL ARTS MAPPER
SINCE 2008-2009

Lampiran Surat

Nomor : T/277/DN.01.01/4.1/VIII/2025

Tanggal : 15 Agustus 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

Pengadilan Tinggi

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Riau
5. Ketua Pengadilan Kepulauan Riau
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
10. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
11. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
12. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
13. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
14. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
15. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
16. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
17. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
18. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
19. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
20. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
21. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
22. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
23. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
24. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
25. Ketua Pengadilan Tinggi Meksar
26. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
27. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BerAKHLAK
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



INDONESIA

28. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari - Sulawesi Tenggara
29. Ketua Pengadilan Tinggi Manado
30. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
31. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon - Maluku
32. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
33. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
34. Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat

Pengadilan Negeri

1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon
3. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
4. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan
5. Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
6. Ketua Pengadilan Negeri Idi
7. Ketua Pengadilan Negeri Takengon
8. Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh
9. Ketua Pengadilan Negeri Jantho
10. Ketua Pengadilan Negeri Sigli
11. Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
12. Ketua Pengadilan Negeri Singkil
13. Ketua Pengadilan Negeri Bireuen
14. Ketua Pengadilan Negeri Blangkajeren
15. Ketua Pengadilan Negeri Calang
16. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang
17. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
18. Ketua Pengadilan Negeri Sabang
19. Ketua Pengadilan Negeri Langsa
20. Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie
21. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
22. Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue
23. Ketua Pengadilan Negeri Medan
24. Ketua Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Pakam
25. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe



26. Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan
27. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
28. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
29. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat
30. Ketua Pengadilan Negeri Stabat
31. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
32. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
33. Ketua Pengadilan Negeri Binjai
34. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar
35. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung
36. Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
37. Ketua Pengadilan Negeri Balige
38. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal
39. Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
40. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai
41. Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan
42. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
43. Ketua Pengadilan Negeri Padang
44. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
45. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi
46. Ketua Pengadilan Negeri Painan
47. Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
48. Ketua Pengadilan Negeri Muaro
49. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar
50. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung
51. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati
52. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
53. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat
54. Ketua Pengadilan Negeri Solok
55. Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
56. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
57. Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh
58. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung
59. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru



60. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
61. Ketua Pengadilan Negeri Batam
62. Ketua Pengadilan Negeri Dumai
63. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
64. Ketua Pengadilan Negeri Rengat
65. Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan
66. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
67. Ketua Pengadilan Negeri Pasar Pengaraian
68. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
69. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
70. Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir
71. Ketua Pengadilan Negeri Ranai
72. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun
73. Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
74. Ketua Pengadilan Negeri Jambi
75. Ketua Pengadilan Negeri Bangko
76. Ketua Pengadilan Negeri Sorolangun
77. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian
78. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti
79. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
80. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
81. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo
82. Ketua Pengadilan Negeri Tebo
83. Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh
84. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
85. Ketua Pengadilan Negeri Curup
86. Ketua Pengadilan Negeri Manna
87. Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur
88. Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan
89. Ketua Pengadilan Negeri Tais
90. Ketua Pengadilan Negeri Tubei
91. Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
92. Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko
93. Ketua Pengadilan Negeri Palembang



94. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
95. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja
96. Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung
97. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
98. Ketua Pengadilan Negeri Lahat
99. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
100. Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
101. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
102. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
103. Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
104. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
105. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan
106. Ketua Pengadilan Negeri Koba
107. Ketua Pengadilan Negeri Mentok
108. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang
109. Ketua Pengadilan Negeri Metro
110. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
111. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih
112. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi
113. Ketua Pengadilan Negeri Liwa
114. Ketua Pengadilan Negeri Menggala
115. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung
116. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana
117. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
118. Ketua Pengadilan Negeri Gendong Tataan
119. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
120. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
121. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
122. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
123. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
124. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
125. Ketua Pengadilan Negeri Serang
126. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
127. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



128. Ketua Pengadilan Negeri Bandung
129. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
130. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
131. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
132. Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya
133. Ketua Pengadilan Negeri Subang
134. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis
135. Ketua Pengadilan Negeri Garut
136. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang
137. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta
138. Ketua Pengadilan Negeri Karawang
139. Ketua Pengadilan Negeri Depok
140. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon
141. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
142. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
143. Ketua Pengadilan Negeri Bogor
144. Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
145. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi
146. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur
147. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan
148. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
149. Ketua Pengadilan Negeri Banjar
150. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang
151. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
152. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
153. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap
154. Ketua Pengadilan Negeri Klaten
155. Ketua Pengadilan Negeri Pati
156. Ketua Pengadilan Negeri Sragen
157. Ketua Pengadilan Negeri Tegal
158. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo
159. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto
160. Ketua Pengadilan Negeri Kudus
161. Ketua Pengadilan Negeri Jepara



162. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran
163. Ketua Pengadilan Negeri Kendal
164. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan
165. Ketua Pengadilan Negeri Magelang
166. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang
167. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga
168. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
169. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi
170. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo
171. Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo
172. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
173. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali
174. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri
175. Ketua Pengadilan Negeri Blora
176. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen
177. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
178. Ketua Pengadilan Negeri Slawi
179. Ketua Pengadilan Negeri Brebes
180. Ketua Pengadilan Negeri Demak
181. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara
182. Ketua Pengadilan Negeri Batang
183. Ketua Pengadilan Negeri Banyumas
184. Ketua Pengadilan Negeri Rembang
185. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar
186. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
187. Ketua Pengadilan Negeri Sleman
188. Ketua Pengadilan Negeri Wates
189. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
190. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
191. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
192. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
193. Ketua Pengadilan Negeri Gresik
194. Ketua Pengadilan Negeri Jember
195. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi



196. Ketua Pengadilan Negeri Malang
197. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo
198. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
199. Ketua Pengadilan Negeri Tuban
200. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
201. Ketua Pengadilan Negeri Jombang
202. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang
203. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan
204. Ketua Pengadilan Negeri Bangil
205. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
206. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun
207. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung
208. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
209. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
210. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
211. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso
212. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
213. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro
214. Ketua Pengadilan Negeri Kediri
215. Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan
216. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan
217. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek
218. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
219. Ketua Pengadilan Negeri Magetan
220. Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
221. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan
222. Ketua Pengadilan Negeri Sampang
223. Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
224. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo
225. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan
226. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
227. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
228. Ketua Pengadilan Negeri Martapura
229. Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru



- 230. Ketua Pengadilan Negeri Barabai
- 231. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai
- 232. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
- 233. Ketua Pengadilan Negeri Rantau
- 234. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
- 235. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
- 236. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru
- 237. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin
- 238. Ketua Pengadilan Negeri Paringin
- 239. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- 240. Ketua Pengadilan Negeri Singkawang
- 241. Ketua Pengadilan Negeri Sintang
- 242. Ketua Pengadilan Negeri Ketapang
- 243. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah
- 244. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau
- 245. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau
- 246. Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang
- 247. Ketua Pengadilan Negeri Sambas
- 248. Ketua Pengadilan Negeri Ngabang
- 249. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
- 250. Ketua Pengadilan Negeri Sampit
- 251. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- 252. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
- 253. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
- 254. Ketua Pengadilan Negeri Buntok
- 255. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang
- 256. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
- 257. Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik
- 258. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun
- 259. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
- 260. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
- 261. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
- 262. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong
- 263. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



264. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
265. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta
266. Ketua Pengadilan Negeri Bontang
267. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
268. Ketua Pengadilan Negeri Penajam
269. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
270. Ketua Pengadilan Negeri Malinau
271. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan
272. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor
273. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
274. Ketua Pengadilan Negeri Watampone
275. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa
276. Ketua Pengadilan Negeri Mamuju
277. Ketua Pengadilan Negeri Sengkang
278. Ketua Pengadilan Negeri Maros
279. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
280. Ketua Pengadilan Negeri Makale
281. Ketua Pengadilan Negeri Palopo
282. Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare
283. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng
284. Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng
285. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang
286. Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene
287. Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
288. Ketua Pengadilan Negeri Takalar
289. Ketua Pengadilan Negeri Selayar
290. Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto
291. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai
292. Ketua Pengadilan Negeri Barru
293. Ketua Pengadilan Negeri Pinrang
294. Ketua Pengadilan Negeri Masamba
295. Ketua Pengadilan Negeri Malili
296. Ketua Pengadilan Negeri Polewali
297. Ketua Pengadilan Negeri Majene



298. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu
299. Ketua Pengadilan Negeri Belopa
300. Ketua Pengadilan Negeri Palu
301. Ketua Pengadilan Negeri Poso
302. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk
303. Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli
304. Ketua Pengadilan Negeri Donggala
305. Ketua Pengadilan Negeri Parigi
306. Ketua Pengadilan Negeri Buol
307. Ketua Pengadilan Negeri Kendari
308. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka
309. Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau
310. Ketua Pengadilan Negeri Raha
311. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha
312. Ketua Pengadilan Negeri Andoolo
313. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo
314. Ketua Pengadilan Negeri Lasusua
315. Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi
316. Ketua Pengadilan Negeri Manado
317. Ketua Pengadilan Negeri Tondano
318. Ketua Pengadilan Negeri Bitung
319. Ketua Pengadilan Negeri Tahuna
320. Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu
321. Ketua Pengadilan Negeri Amurang
322. Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi
323. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane
324. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
325. Ketua Pengadilan Negeri Limboto
326. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta
327. Ketua Pengadilan Negeri Marisa
328. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
329. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan
330. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
331. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja



- 332. Ketua Pengadilan Negeri Negara
- 333. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura
- 334. Ketua Pengadilan Negeri Bangli
- 335. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura
- 336. Ketua Pengadilan Negeri Mataram
- 337. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
- 338. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
- 339. Ketua Pengadilan Negeri Selong
- 340. Ketua Pengadilan Negeri Dompu
- 341. Ketua Pengadilan Negeri Praya
- 342. Ketua Pengadilan Negeri Kupang
- 343. Ketua Pengadilan Negeri Atambua
- 344. Ketua Pengadilan Negeri Ende
- 345. Ketua Pengadilan Negeri Larantuka
- 346. Ketua Pengadilan Negeri So-E
- 347. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu
- 348. Ketua Pengadilan Negeri Meumere
- 349. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng
- 350. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu
- 351. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
- 352. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa
- 353. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi
- 354. Ketua Pengadilan Negeri Lembata
- 355. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao
- 356. Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
- 357. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi
- 358. Ketua Pengadilan Negeri Ambon
- 359. Ketua Pengadilan Negeri Masohi
- 360. Ketua Pengadilan Negeri Tual
- 361. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
- 362. Ketua Pengadilan Negeri Namlea
- 363. Ketua Pengadilan Negeri Dobo
- 364. Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
- 365. Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa



- 366. Ketua Pengadilan Negeri Ternate
- 367. Ketua Pengadilan Negeri Soa-Sio
- 368. Ketua Pengadilan Negeri Labuha
- 369. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo
- 370. Ketua Pengadilan Negeri Sanana
- 371. Ketua Pengadilan Negeri Bobong
- 372. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura
- 373. Ketua Pengadilan Negeri Sorong
- 374. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari
- 375. Ketua Pengadilan Negeri Wamena
- 376. Ketua Pengadilan Negeri Merauke
- 377. Ketua Pengadilan Negeri Biak
- 378. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak
- 379. Ketua Pengadilan Negeri Nabire
- 380. Ketua Pengadilan Negeri Serui
- 381. Ketua Pengadilan Negeri Timika
- 382. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN K E P A L A

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : T/276/DN.01.01/4.1/VIII/2025 Jakarta, 15 Agustus 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penilaian Risiko Nasional terhadap
Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA TPPU) Tahun 2025

Yth. Ketua Kamar Pidana
Mahkamah Agung Republik Indonesia
di
tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
2. Keputusan Kepala PPATK Nomor 101 Tahun 2025 tentang Tim Penyusunan Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai upaya dalam mewujudkan komitmen Indonesia atas kepatuhan standar Financial Action Task Force (FATF), khususnya dalam penerapan rekomendasi 1 mengenai penilaian risiko nasional terhadap TPPU terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terkini guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) kepada seluruh pihak pemangku kepentingan dalam melakukan mitigasi risiko terhadap TPPU maupun tindak pidana asal.

Berkenaan hal tersebut, PPATK selaku *focal point* dalam rezim anti pencucian uang bersama seluruh pihak pemangku kepentingan melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) akan melakukan pengkinan penilaian risiko nasional terhadap TPPU (*national risk assessment on money laundering*) tahun 2025. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini dalam tahapan pengumpulan data dan informasi secara nasional dari seluruh pihak pemangku kepentingan, dengan melibatkan pihak jasa konsultan terpilih yaitu **PT Surveyor Indonesia** sebagai



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL ACTION MEMBER
FINANCIAL ACTION BOARD

pelaksana survei nasional berbasis online atau *web based* melalui tautan berikut ini <https://nraindonesia.ppatk.go.id/kuesioner/3/tppu>.

Guna menyukseskan pelaksanaan penyusunan NRA TPPU Tahun 2025, kami harapkan adanya partisipasi aktif dan kerja sama dari seluruh pihak pemangku kepentingan, untuk dapat:

- a. melakukan pengisian survei secara online untuk mengidentifikasi faktor ancaman, kerentanan dan risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
- b. menyediakan basis data kuantitatif maupun kualitatif (*self-assessment*) terkait penanganan tindak pidana pencucian uang sesuai tugas, fungsi dan kewenangan instansi/lembaga;
- c. memberikan saran dan rekomendasi strategis & operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di tingkat domestik maupun lintas negara (*cross border crimes*);

Berkenaan hal tersebut, mohon perkenan Bapak Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk **menunjuk perwakilan hakim dari seluruh kantor Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri** untuk dapat melakukan pengisian kuesioner sesuai batas waktu yang telah ditentukan **paling lambat disampaikan pada tanggal 12 September 2025** dengan buku pedoman pengisian yang telah disediakan berikut ini <https://bit.ly/PedomanNRA-2025>, password: NRAIndonesia2025. Bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh jawaban responden yang diberikan akan merepresentasikan kondisi instansi/lembaga masing-masing.

Untuk konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut, kiranya dapat menghubungi narahubung Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPAK atas nama Sdr. Mardiansyah (HP: 0878-8589-6385) atau Sdri. Kristina Widhi (HP: 085-741-414-909) atau narahubung Hakim Yustisial Kamar Pidana Mahkamah Agung atas nama Bapak Dodik Setyo Wijayanto (HP: 0812-6069-5015) atau email NRAIndonesia2025@ppatk.go.id.



Demikian permohonan ini kami sampaikan, keberhasilan penyusunan NRA TPPU Indonesia Tahun 2025 ini, sangat tergantung dari dukungan dan kerjasama yang baik dari instansi/lembaga yang Bapak Pimpin. Atas perhatian, dukungan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPATK



Ivan Yustiavandana

Tembusan:

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN K E P A L A

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : T/277/DN.01.01/4.1/VIII/2025 Jakarta, 15 Agustus 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penilaian Risiko Nasional terhadap
Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA TPPU) Tahun 2025

Yth. Bapak/Ibu Pejabat Sebagaimana Terlampir
di
tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
2. Keputusan Kepala PPATK Nomor 101 Tahun 2025 tentang Tim Penyusunan Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai upaya dalam mewujudkan komitmen Indonesia atas kepatuhan standar Financial Action Task Force (FATF), khususnya dalam penerapan rekomendasi 1 mengenai penilaian risiko nasional terhadap TPPU terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terkini guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) kepada seluruh pihak pemangku kepentingan dalam melakukan mitigasi risiko terhadap TPPU maupun tindak pidana asal.

Berkenaan hal tersebut, PPATK selaku *focal point* dalam rezim anti pencucian uang bersama seluruh pihak pemangku kepentingan melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) akan melakukan pengkinan penilaian risiko nasional terhadap TPPU (*national risk assessment on money laundering*) tahun 2025. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini dalam tahapan pengumpulan data dan informasi secara nasional dari seluruh pihak pemangku kepentingan, dengan melibatkan pihak jasa konsultan terpilih yaitu **PT Surveyor Indonesia** sebagai



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



pelaksana survei nasional berbasis online atau *web based* melalui tautan berikut ini <https://nraindonesia.ppatk.go.id/kuesioner/3/tppu>.

Guna menyukseskan pelaksanaan penyusunan NRA TPPU Tahun 2025, kami harapkan adanya partisipasi aktif dan kerja sama dari seluruh pihak pemangku kepentingan, untuk dapat:

- a. melakukan pengisian survei secara online untuk mengidentifikasi faktor ancaman, kerentanan dan risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
- b. menyediakan basis data kuantitatif maupun kualitatif (*self-assessment*) terkait penanganan tindak pidana pencucian uang sesuai tugas, fungsi dan kewenangan instansi/lembaga;
- c. memberikan saran dan rekomendasi strategis & operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di tingkat domestik maupun lintas negara (*cross border crimes*);

Berkenaan hal tersebut, mohon perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk menunjuk perwakilan pejabat atau pegawai untuk dapat melakukan pengisian kuesioner sesuai batas waktu yang telah ditentukan **paling lambat disampaikan pada tanggal 12 September 2025** dengan buku pedoman pengisian yang telah disediakan berikut ini <https://bit.ly/PedomanNRA-2025>, password: NRAIndonesia2025. Bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh jawaban responden yang diberikan akan merepresentasikan kondisi instansi/lembaga masing-masing.

Sebagai tambahan informasi bahwa tim akan menyelenggarakan sosialisasi pengisian kuesioner tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025

Waktu : 13.30 WIB - selesai

Link Zoom : <https://bit.ly/SosialisasiNRA2025-Pengadilan>

Meeting ID: 851 6828 0554 Passcode: 380693

Untuk konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut, kiranya dapat menghubungi narahubung Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPA TK atas nama Sdr. Mardiansyah (HP: 0878-8589-6385) atau Sdri. Kristina Widhi (HP: 085-741-414-909) atau narahubung Hakim Yustisial Kamar Pidana Mahkamah Agung atas nama Bapak Dodik Setyo Wijayanto (HP: 0812-6069-5015) atau melalui email NRAIndonesia2025@ppatk.go.id.



Demikian permohonan ini kami sampaikan, keberhasilan penyusunan NRA TPPU Indonesia Tahun 2025 ini, sangat tergantung dari dukungan dan kerjasama yang baik dari instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Atas perhatian, dukungan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPATK



Ivan Yustiavandana



Lampiran Surat

Nomor : T/277/DN.01.01/4.1/VIII/2025

Tanggal : 15 Agustus 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

Pengadilan Tinggi

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Riau
5. Ketua Pengadilan Kepulauan Riau
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
10. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
11. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
12. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
13. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
14. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
15. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
16. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
17. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
18. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
19. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
20. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
21. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
22. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
23. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
24. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
25. Ketua Pengadilan Tinggi Maksiar
26. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
27. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
DIGITAL SIGNATURE
PADA JUDUL DAN ISI

28. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari - Sulawesi Tenggara
29. Ketua Pengadilan Tinggi Manado
30. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
31. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon - Maluku
32. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
33. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
34. Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat

Pengadilan Negeri

1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon
3. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
4. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan
5. Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
6. Ketua Pengadilan Negeri Idi
7. Ketua Pengadilan Negeri Takengon
8. Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh
9. Ketua Pengadilan Negeri Jantho
10. Ketua Pengadilan Negeri Sigli
11. Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
12. Ketua Pengadilan Negeri Singkil
13. Ketua Pengadilan Negeri Bireuen
14. Ketua Pengadilan Negeri Blangkajeren
15. Ketua Pengadilan Negeri Calang
16. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang
17. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
18. Ketua Pengadilan Negeri Sabang
19. Ketua Pengadilan Negeri Langsa
20. Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie
21. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
22. Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue
23. Ketua Pengadilan Negeri Medan
24. Ketua Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Pakam
25. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe



26. Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan
27. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
28. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
29. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat
30. Ketua Pengadilan Negeri Stabat
31. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
32. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
33. Ketua Pengadilan Negeri Binjai
34. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar
35. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung
36. Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
37. Ketua Pengadilan Negeri Balige
38. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal
39. Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
40. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai
41. Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan
42. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
43. Ketua Pengadilan Negeri Padang
44. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
45. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi
46. Ketua Pengadilan Negeri Painan
47. Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
48. Ketua Pengadilan Negeri Muaro
49. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar
50. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung
51. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati
52. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
53. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat
54. Ketua Pengadilan Negeri Solok
55. Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
56. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
57. Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh
58. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung
59. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru



60. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
61. Ketua Pengadilan Negeri Batam
62. Ketua Pengadilan Negeri Dumai
63. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
64. Ketua Pengadilan Negeri Rengat
65. Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan
66. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
67. Ketua Pengadilan Negeri Pasar Pengaraian
68. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
69. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
70. Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir
71. Ketua Pengadilan Negeri Ranai
72. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun
73. Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
74. Ketua Pengadilan Negeri Jambi
75. Ketua Pengadilan Negeri Bangko
76. Ketua Pengadilan Negeri Sorolangun
77. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian
78. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti
79. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
80. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
81. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo
82. Ketua Pengadilan Negeri Tebo
83. Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh
84. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
85. Ketua Pengadilan Negeri Curup
86. Ketua Pengadilan Negeri Manna
87. Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur
88. Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan
89. Ketua Pengadilan Negeri Tais
90. Ketua Pengadilan Negeri Tubei
91. Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
92. Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko
93. Ketua Pengadilan Negeri Palembang



94. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
95. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja
96. Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung
97. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
98. Ketua Pengadilan Negeri Lahat
99. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
100. Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
101. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
102. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
103. Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
104. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
105. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan
106. Ketua Pengadilan Negeri Koba
107. Ketua Pengadilan Negeri Mentok
108. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang
109. Ketua Pengadilan Negeri Metro
110. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
111. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih
112. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi
113. Ketua Pengadilan Negeri Liwa
114. Ketua Pengadilan Negeri Menggala
115. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung
116. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana
117. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
118. Ketua Pengadilan Negeri Gendong Tataan
119. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
120. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
121. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
122. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
123. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
124. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
125. Ketua Pengadilan Negeri Serang
126. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
127. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



128. Ketua Pengadilan Negeri Bandung
129. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
130. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
131. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
132. Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya
133. Ketua Pengadilan Negeri Subang
134. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis
135. Ketua Pengadilan Negeri Garut
136. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang
137. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta
138. Ketua Pengadilan Negeri Karawang
139. Ketua Pengadilan Negeri Depok
140. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon
141. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
142. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
143. Ketua Pengadilan Negeri Bogor
144. Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
145. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi
146. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur
147. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan
148. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
149. Ketua Pengadilan Negeri Banjar
150. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang
151. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
152. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
153. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap
154. Ketua Pengadilan Negeri Klaten
155. Ketua Pengadilan Negeri Pati
156. Ketua Pengadilan Negeri Sragen
157. Ketua Pengadilan Negeri Tegal
158. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo
159. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto
160. Ketua Pengadilan Negeri Kudus
161. Ketua Pengadilan Negeri Jepara



162. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran
163. Ketua Pengadilan Negeri Kendal
164. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan
165. Ketua Pengadilan Negeri Magelang
166. Ketua Pengadilan Negeri Pemasang
167. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga
168. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
169. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi
170. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo
171. Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo
172. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
173. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali
174. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri
175. Ketua Pengadilan Negeri Blora
176. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen
177. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
178. Ketua Pengadilan Negeri Slawi
179. Ketua Pengadilan Negeri Brebes
180. Ketua Pengadilan Negeri Demak
181. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara
182. Ketua Pengadilan Negeri Batang
183. Ketua Pengadilan Negeri Banyumas
184. Ketua Pengadilan Negeri Rembang
185. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar
186. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
187. Ketua Pengadilan Negeri Sleman
188. Ketua Pengadilan Negeri Wates
189. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
190. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
191. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
192. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
193. Ketua Pengadilan Negeri Gresik
194. Ketua Pengadilan Negeri Jember
195. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi



196. Ketua Pengadilan Negeri Malang
197. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo
198. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
199. Ketua Pengadilan Negeri Tuban
200. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
201. Ketua Pengadilan Negeri Jombang
202. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang
203. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan
204. Ketua Pengadilan Negeri Bangil
205. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
206. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun
207. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung
208. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
209. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
210. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
211. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso
212. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
213. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro
214. Ketua Pengadilan Negeri Kediri
215. Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan
216. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan
217. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek
218. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
219. Ketua Pengadilan Negeri Magetan
220. Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
221. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan
222. Ketua Pengadilan Negeri Sampang
223. Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
224. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo
225. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan
226. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
227. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
228. Ketua Pengadilan Negeri Martapura
229. Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru



230. Ketua Pengadilan Negeri Barabai
231. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai
232. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
233. Ketua Pengadilan Negeri Rantau
234. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
235. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
236. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru
237. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin
238. Ketua Pengadilan Negeri Paringin
239. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
240. Ketua Pengadilan Negeri Singkawang
241. Ketua Pengadilan Negeri Sintang
242. Ketua Pengadilan Negeri Ketapang
243. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah
244. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau
245. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau
246. Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang
247. Ketua Pengadilan Negeri Sambas
248. Ketua Pengadilan Negeri Ngabang
249. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
250. Ketua Pengadilan Negeri Sampit
251. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
252. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh
253. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
254. Ketua Pengadilan Negeri Buntok
255. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang
256. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
257. Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik
258. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun
259. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
260. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
261. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
262. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong
263. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



264. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
265. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta
266. Ketua Pengadilan Negeri Bontang
267. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
268. Ketua Pengadilan Negeri Penajam
269. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
270. Ketua Pengadilan Negeri Malinau
271. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan
272. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor
273. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
274. Ketua Pengadilan Negeri Watampone
275. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa
276. Ketua Pengadilan Negeri Mamuju
277. Ketua Pengadilan Negeri Sengkang
278. Ketua Pengadilan Negeri Maros
279. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
280. Ketua Pengadilan Negeri Makale
281. Ketua Pengadilan Negeri Palopo
282. Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare
283. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng
284. Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng
285. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang
286. Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene
287. Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
288. Ketua Pengadilan Negeri Takalar
289. Ketua Pengadilan Negeri Selayar
290. Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto
291. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai
292. Ketua Pengadilan Negeri Barru
293. Ketua Pengadilan Negeri Pinrang
294. Ketua Pengadilan Negeri Masamba
295. Ketua Pengadilan Negeri Malili
296. Ketua Pengadilan Negeri Polewali
297. Ketua Pengadilan Negeri Majene



298. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu
299. Ketua Pengadilan Negeri Belopa
300. Ketua Pengadilan Negeri Palu
301. Ketua Pengadilan Negeri Poso
302. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk
303. Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli
304. Ketua Pengadilan Negeri Donggala
305. Ketua Pengadilan Negeri Parigi
306. Ketua Pengadilan Negeri Buol
307. Ketua Pengadilan Negeri Kendari
308. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka
309. Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau
310. Ketua Pengadilan Negeri Raha
311. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha
312. Ketua Pengadilan Negeri Andoolo
313. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo
314. Ketua Pengadilan Negeri Lasusua
315. Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi
316. Ketua Pengadilan Negeri Manado
317. Ketua Pengadilan Negeri Tondano
318. Ketua Pengadilan Negeri Bitung
319. Ketua Pengadilan Negeri Tahuna
320. Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu
321. Ketua Pengadilan Negeri Amurang
322. Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi
323. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane
324. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
325. Ketua Pengadilan Negeri Limboto
326. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta
327. Ketua Pengadilan Negeri Marisa
328. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
329. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan
330. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
331. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja



- 332. Ketua Pengadilan Negeri Negara
- 333. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura
- 334. Ketua Pengadilan Negeri Bangli
- 335. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura
- 336. Ketua Pengadilan Negeri Mataram
- 337. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
- 338. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
- 339. Ketua Pengadilan Negeri Selong
- 340. Ketua Pengadilan Negeri Dompu
- 341. Ketua Pengadilan Negeri Praya
- 342. Ketua Pengadilan Negeri Kupang
- 343. Ketua Pengadilan Negeri Atambua
- 344. Ketua Pengadilan Negeri Ende
- 345. Ketua Pengadilan Negeri Larantuka
- 346. Ketua Pengadilan Negeri So-E
- 347. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu
- 348. Ketua Pengadilan Negeri Meumere
- 349. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng
- 350. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu
- 351. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
- 352. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa
- 353. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi
- 354. Ketua Pengadilan Negeri Lembata
- 355. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao
- 356. Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
- 357. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi
- 358. Ketua Pengadilan Negeri Ambon
- 359. Ketua Pengadilan Negeri Masohi
- 360. Ketua Pengadilan Negeri Tual
- 361. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
- 362. Ketua Pengadilan Negeri Namlea
- 363. Ketua Pengadilan Negeri Dobo
- 364. Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
- 365. Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa



- 366. Ketua Pengadilan Negeri Ternate
- 367. Ketua Pengadilan Negeri Soa-Sio
- 368. Ketua Pengadilan Negeri Labuha
- 369. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo
- 370. Ketua Pengadilan Negeri Sanana
- 371. Ketua Pengadilan Negeri Bobong
- 372. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura
- 373. Ketua Pengadilan Negeri Sorong
- 374. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari
- 375. Ketua Pengadilan Negeri Wamena
- 376. Ketua Pengadilan Negeri Merauke
- 377. Ketua Pengadilan Negeri Biak
- 378. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak
- 379. Ketua Pengadilan Negeri Nabire
- 380. Ketua Pengadilan Negeri Serui
- 381. Ketua Pengadilan Negeri Timika
- 382. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana

